

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemecahan masalah yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Tingkat jumlah permintaan terhadap pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo yang didasari padz persentase kemauan berpindah moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum adalah sebesar 54% atau sekitar 250.217 orang/hari.
2. Dalam penentuan rute angkutan pedesaan, diperoleh 5 (lima) trayek usulan dengan pola jaringan RADIAL yaitu :
 - a. Trayek 01 dengan rute Terminal Situbondo-Jl. Ijen- Jl. Argopuro-Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 1-Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 2-Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 3-Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 4- Jl. Raya Banyuwangi 5.
 - b. Trayek 02 dengan rute Terminal Situbondo-Jl. A. Jakfar-Jl. Ahmad Yani 2-Jl. Sucipto- Jl. Kalbut.
 - c. Trayek 03 dengan rute Terminal Besuki-Jl.Binor 4-Jl.Binor 5- Jl.Buduan-Jl. Tribungan- Jl. Selowogo
3. Berdasarkan ukuran kota dan fungsi jalannya, jenis armada yang akan digunakan pada trayek usulan adalah bus kecil dengan kapasitas 16 orang serta berdasarkan analisis yang telah dilakukan jumlah armada pada masing-masing trayek adalah :
 - a. Trayek 01, dengan jumlah armada 83 unit
 - b. Trayek 02 dengan jumlah armada 26 unit
 - c. Trayek 03 dengan jumlah armada 83 unit

4. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada trayek usulan, maka diperoleh perhitungan tarif pada masing-masing trayek rencana yaitu:
 - a. Trayek 01 dengan tarif Rp. 6.893,71
 - b. Trayek 02 dengan tarif Rp. 2.835,74
 - c. Trayek 03 dengan tarif Rp. 4.230,39

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada perencanaan ulang jaringan trayek di Kabupaten Situbondo, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlu adanya SK Trayek untuk angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo, dikarenakan SK Trayek merupakan sebuah landasan hukum terkait pengoperasian angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo.
2. Dalam penentuan rute angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo perlu mempertimbangkan jumlah permintaan dan tata guna lahan yang ada. Sehingga usulan perencanaan jaringan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo.
3. Dalam pemilihan jenis armada maupun jumlah armada angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo, dapat dijadikan bahan pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan.
4. Dalam penyelenggaraannya diperlukan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo maupun dinas-dinas terkait untuk mendorong minat masyarakat kabupaten Situbondo dalam menggunakan angkutan umum, seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan angkutan umum di Kabupaten Situbondo.